



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI MUSRIKAH
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 789017

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.070.000.000**

1. Tanah Seluas 1869 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI
Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 386 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL
SENDIRI Rp. 65.000.000
3. Tanah Seluas 305 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL
SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL
SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000
7. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000
9. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL
SENDIRI Rp. 70.000.000
10. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 280.000.000**



1. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 180.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI LANCER ANTIK ORIGINAL SEDAN Tahun
1982, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 99.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 390.517.068

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.840.317.068

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.840.317.068

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.